

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang telah menarik perhatian hampir di seluruh negara di dunia karena kasus-kasus tersebut dijumpai bahkan pada negara maju sekalipun pada negara berkembang (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Beberapa badan dunia seperti UNICEF dan WHO bersama dengan serta sejumlah organisasi non-pemerintah yang berkomitmen dalam bidang kekerasan yang terus berkomitmen dalam penghapusan kekerasan, yang mana berkomitmen dengan memberikan berbagai program serta kebijakan tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang terus didorong untuk dilakukan di seluruh negara di Dunia (KPPA RI, 1989).

Kasus kekerasan saat ini masih dijumpai di Negara-negara berkembang, kasus kekerasan yang dijumpai pada Negara berkembang seperti Negara Afrika Selatan yang mana kasus kekerasan sering terjadi dimana pelaku kasus kekerasan tersebut kebanyakan merupakan orang terdekat seperti pasangan pria serta orang terdekat mereka dikarenakan korban perempuan dan anak tidak dapat mengekspresikan kekuasaan pelaku kekerasan tersebut, adapun presentase kasus kekerasan terhadap perempuan sekitar 37% dan kasus kekerasan terhadap anak sekeitar 21,3% yang telah terjadi di Negara Afrika Selatan (Devakumar et al., 2021). Sedangkan di Negara Kolombia kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui survei dijumpai sekitar 38% kasus kekerasan pada perempuan dan anak berusia 15-49 tahun yang telah dilaporkan pada tahun 2021 terakhir (Mootz et al., 2019). Pada Negara Rumania yang merupakan negara terbesar ke 7 di dunia yang juga masih terjadi adanya kasus kekerasan dengan presentase 3,7% kasus kekerasan terhadap perempuan serta 15% kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan di Negara India kasus kekerasan terhadap perempuan dijumpai sekitar 31% dan kekerasan pada anak berusia 15-19 tahun sekitar 16% yang melaporkan mengalami kekerasan berupa pelecehan fisik atau

seksual(Nair et al., 2020). Di Negara China sendiri isu kekerasan kebanyakan terjadi daerah perkotaan dimana pelaku dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, serta orang terdekat korban dengan presentase sebesar 45,1%, sedangkan di Negara Nigeria presentase kekerasan sekitar 35,9% dan di Negara Ethiopia dengan presentase kasus kekerasan yang tinggi sekitar 75%(Chang et al., 2022).

Dewasa ini kekerasan di Indonesia sendiri menjadi fenomena permasalahan yang cukup kerap dijumpai. Data terkait kekerasan di Indonesia didapatkan dari Kementerian PPA RI bersama Kemensos, BAPPENAS, dan BPS, dengan dukungan UNICEF Indonesia yang telah melakukan survei kekerasan terhadap perempuan Anak di Indonesia. Adapun data dari Kementrian PPA RI tentang kasus kekerasan pada tahun 2022 terdapat 18.393 kasus kekerasan(KPPA RI, 2004), antara lain kasus kekerasan yang kerap dijumpai seperti kekerasan pada anak, pelecehan seksual pada anak dan perempuan, pembullying, serta KDRT pada perempuan yang mana sebagian besar pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban seperti orang tua, suami atau istri, teman, serta pacar. Dari kasus-kasus kekerasan tersebut yang telah dijadikan landasan oleh pemerintah dalam berkomitmen untuk melindungi serta dijadikan sebagai landasan hukum terkait kasus kekerasan di Indonesia dengan membuat kebijakan berupa UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(RI, 2002) dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KPPA RI, 2004).

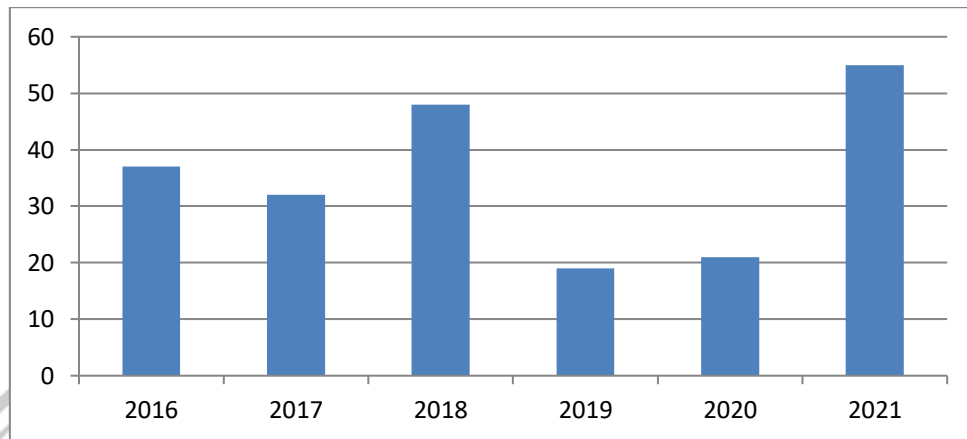
Secara universal kekerasan diartikan sebagai suatu perlakuan yang dilakukan oleh individu kepada individu lain yang menyebabkan penderitaan dalam bentuk fisik dan psikologis. Adapun yang dimaksud anak-anak merupakan seseorang yang berusia 0 (Nol) tahun yang masih ada dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak merujuk pada perbuatan seseorang kepada seseorang di bawah usia 18 tahun yang mengakibatkan penderitaan pada kondisi fisik serta psikologis (KPPA RI, 1989). Fenomena kekerasan sering kali dijumpai di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya mereka mendapatkan perlakuan aman dan nyaman di dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Ironisnya

kekerasan ini dipandang sebagai hal yang biasa dan bukan dipandang sebagai suatu tindak kejahatan sehingga sering diabaikan pada khalayak masyarakat.

Dalam upaya pemerintah dalam penanganan kekerasan dan wujud melindungi korban kekerasan terdapat rintangan yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan, rintangan tersebut antara lain yakni rendahnya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan kepada pihak berwajib, kurangnya kesadaran korban dalam menyuarakan kekerasan yang dialaminya, serta seorang yang menjadi korban kekerasan tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban tindak kekerasan (Fitri et al., 2015). Korban kekerasan tidak dapat menghindari adanya kekerasan pada dirinya yang mana korban sering kali takut melaporkan kepada pihak berwajib karena mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan, prespektif keluarga yang menganggap kasus kekerasan sebagai sesuatu yang harus ditutupi, selain itu ketidakmauan masyarakat yang menyaksikan kasus kekerasan tersebut untuk menjadi saksi, serta kurangnya kepercayaan masyarakat kepada program yang diberikan pemerintah dalam menangani kekerasan serta memfasilitasi adanya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, selain itu pemerintah sering kali kurang tanggap dalam menegakkan hukum terkait kekerasan (Fuad, 2014).

Fenomena kasus kekerasan kerap terjadi di kota besar hingga kota kecil di Indonesia salah satunya terjadi di Kota Batu. Kasus kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik melainkan juga berbentuk kekerasan psikologis diantaranya, kasus penganiayaan berat, penganiayaan ringan, pemerkosaan, penghinaan, pencurian dengan kekerasan, KDRT, perundungan terhadap anak, dan pencabulan. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Batu terdapat korban kekerasan yang mana, data tersebut merupakan bukti nyata kasus yang dialami langsung oleh korban kekerasan di Kota Batu yang tertuang pada PerdaBatu No.2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan(Pemerintah Daerah Kota Batu, 2013).

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Batu



Sumber: DP3AP2KB Kota Batu

Berdasarkan grafik 1 terdapat data jumlah korban kekerasan yang mana total korban kekerasan pada tahun 2016 terdapat 37 korban; tahun 2017 turun menjadi 32 korban; sedangkan di tahun 2018 ada sejumlah 48 korban; dimana pada tahun 2019 turun drasitis terdapat 19 korban; tahun 2020 terdapat 21 korban; dan pada tahun 2021 terdapat kenaikan sampai 55 korban di Kota Batu. Data tersebut merupakan bukti nyata fenomena kasus kekerasan yang dialami langsung oleh korban kekerasan di Kota Batu.

Bukan lagi menjadi rahasia bahwasannya terdapat banyak korban kekerasan yang memilih untuk diam dan tertutup, baik malu serta menghindari adanya prespektif ketertimpangan norma di masyarakat dan adanya ancam oleh pelaku kekerasan dibandingkan terbuka dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap korban kasus kekerasan. Terkait kasus tersebut seharusnya dibutuhkan adanya pembandingan terkait keharusan pelaporan kasus kekerasan serta melakukan berbagai upaya penanganan dan penanggulangan baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta pada khalayak masyarakat. Dari kasus kekerasan tersebut mengakibatkan korban enggan dan takut untuk mencari pertolongan bahkan cenderung disembunyikan dan sulit mencari solusi serta jalan keluar dari permasalahannya, masalah ini akan berpengaruh pada kualitas hidup dan kesehatan

seseorang secara umum termasuk kesehatan fisik. Setiap masyarakat berhak mendapatkan penanganan kesehatan seharusnya bukan hanya berfokus pada kesehatan fisik yang mana tidak kalah penting adalah kesehatan mental atau psikologi pada perempuan serta anak korban kekerasan, masalah kesehatan mental berkaitan erat dengan stigma. Berdasarkan PerdaBatu No.2 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pemerintah Kota Batu berkoitmen melalui PUSPAGA Bhakti Pertiwi (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam penanganan kesehatan mental mulai dari perlindungan, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi serta penanganan secara rahasia terhadap korban kekerasan di Kota Batu (Daerah & Batu, 2013).

DP3AP2KB Kota Batu membuat kebijakan serta menyelenggarakan suatu kebijakan dan program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta anak melalui PUSPAGA Bhakti Pertiwi (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang telah ditetapkan dalam SK Walikota Batu antara lain dapat memberikan pelayanan konsultasi, konseling, dan informasi bagi anak-anak dan keluarga. Memberikan pelayanan berupa pembelajaran untuk keluarga melalui pendidikan yang diperuntukkan kepada orang tua atau calon orang tua. Memberikan pelayanan berupa rujukan berbentuk solusi yang diberikan bagi permasalahan yang ada pada keluarga. Melaporkan hasil unit pelayanan kepada Kepala Dinas P3AP2KB setiap bulannya (Dinas P3AP2KB Kota Batu, 2018).

Penanganan kasus kekerasan sudah sepatutnya menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Batu, yang mana tak kalah penting sebagai penanganan kesehatan mental serta ketegasan penegakan hukum terhadap korban kekerasan. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dijumpai angka kasus kekerasan yang cukup meningkat dari kasus kekerasan pada tahun sebelumnya serta pemerintah masih kurang mempublikasikan PUSPAGA Bhakti Pertiwi kepada khalayak masyarakat Kota Batu bahwasannya PUSPAGA Bhakti Pertiwi dapat berpengaruh dalam penanganan kasus kekerasan serta adanya hukum yang mengikat terhadap korban kekerasan di Kota Batu (Perlindungan Anak et al., 2018).

Menurut (Silalahi, 2004) dalam penelitiannya mengatakan komunikasi pemerintah merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar *stakeholder* yang berhubungan dalam konteks organisasi pemerintahan, Komunikasi pemerintah pada hubungannya berupa informasi, selain itu berupa penyebaran ide, instruksi, atau perasaan yang mana berkesinambungan dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan komunikasi pemerintah menurut (Sultan. 2017) komunikasi pemerintah merujuk pada tujuan, actor yang terlibat, serta bagaimana praktik komunikasi yang dilakukan antar pemerintah dan pejabat dari berbagai instansi lainnya dalam lingkup pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini komunikasi pemerintah melalui PUSPAGA Bhakti Pertiwi dapat dijadikan alternative dalam komunikasi Pemerintah Kota Batu melalui DP3AP2KB dalam penurunan angka kasus kekerasan di Kota Batu. Komunikasi pemerintah dalam hal ini guna menangani kasus kekerasan di Kota Batu melalui PUSPAGA Bhakti Pertiwi serta memastikan seberapa berpengaruh terhadap penanganan serta penurunan angka kasus kekerasan pada tahap penyelenggaraannya. Berangkat dari komunikasi pemerintah tersebut peneliti mengetahui apakah dari komunikasi pemerintah tersebut sudah berjalan secara efektif dan terarah, maka dari itu penelitian ini dilakukan.;

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUSPAGA BHAKTI PERTIWI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BATU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari gambaran yang peneliti sajikan tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah dalam penyusunan penelitian ini, yaitu terkait Bagaimana mekanisme komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat menguraikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi pemerintah terkait mekanisme PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis :

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu terutama ilmu pemerintahan serta menjadi tolak ukur untuk penelitian berkelanjutan yang akan dilakukan.

1.4.2 Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait komunikasi pemerintah. Manfaat praktis yang dapat diberikan bagi pemerintah adalah diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap programnya.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memberikan makna (definisi) konsep yang digunakan dalam penelitian. Definisi konsep dari masing-masing variabel judul sebagai berikut:

1.5.1 Komunikasi Pemerintah

Malone memandang bahwa komunikasi pemerintah merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antar *stakeholder* yang berhubungan dalam konteks organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintah berlangsung melalui jaringan atau hubungan yang saling terkait satu sama lain, berdasarkan aturan formal. Selain menyampaikan informasi, komunikasi ini juga melibatkan pertukaran ide, instruksi, dan ekspresi perasaan yang terkait dengan tindakan dan kebijakan pemerintah.

1.5.2 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

PUSPAGA Bhakti Pertiwi merupakan sebuah program pelayanan konsultasi, konseling, informasi bagi anak, orang tua, dan penanganan rujukan serta pelapor pelaku kekerasan. PUSPAGA Bhakti Pertiwi merupakan sebuah program komitmen Pemerintah Kota Batu dalam perwujudan kebijakan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan di Kota Batu.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sekumpulan petunjuk dalam konsep untuk menguji kesempurnaan :

Tabel 1.1 Konsep, Indikator, dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis Puspaga Bhakti Pertiwi Sebagai Media Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Batu	Mekanisme komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu	a. Penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi Sebagai Komunikator Pemerintah b. Upaya PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu c. Aktor yang terlibat dalam komunikasi pemerintah PUSPAGA Bhakti Pertiwi d. Pengaruh PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam penanganan kekerasan di Kota Batu

Sumber : Data Olahan 2023

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan berpikir dan bertindak yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Peneliti mengumpulkan data yang valid dan konkret. Metode penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian analisis PUSPAGA Bhakti Pertiwi sebagai komunikasi pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan di Kota Batu menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan suatu analisis dengan tidak menggunakan statistika dalam prosedur analisisnya.

Menurut (Denzin & Lincoln, 1994) Penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah untuk menginterpretasikan fenomena yang diamati, melibatkan berbagai metode. Sementara itu, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data dan sampel yang ada.

Mengambarkan secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan mengenai pembahasan terkait komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi, serta sifat dan hubungan antara fenomena sosial terkait dengan kasus kekerasan di Kota. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dipilih supaya peneliti dapat menggambarkan pembahasan terkait PUSPAGA Bhakti Pertiwi sebagai komunikasi pemerintah dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu.

1.7.2 Sumber data

Dalam rangka menganalisis dan membahas tentang komunikasi pemerintah dalam pelaksanaan PUSPAGA Bhakti Pertiwi untuk menangani kasus kekerasan di Kota Batu, penulis berupaya mengumpulkan data dari dua sumber, diantaranya:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumbernya. Dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan informan yang merupakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam hubungan komunikasi pemerintah di PUSPAGA Bhakti Pertiwi. Peneliti berupaya untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman mereka tentang penyelenggaraan, bentuk komunikasi pemerintah, aktor yang terlibat, serta pengaruh PUSPAGA Bhakti Pertiwi terhadap penanganan kekerasan di Kota Batu. Data yang didapat oleh peneliti berasal dari informan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Batu, Ketua PUSPAGA Bhakti Pertiwi Kota Batu, Ketua P2TP2A Kota Batu, serta pejabat dan staff yang berhubungan dengan mekanisme terjalannya komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan di Kota Batu. Dengan panduan penelitian agar pembahasan dan tujuan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan tepat dan jelas.

b. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah kumpulan informasi yang sudah dikumpulkan bisa berupa angka atau deskripsi, misalnya tentang bagaimana komunikasi pemerintah dapat memengaruhi penurunan angka kasus kekerasan pada tahap penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi di Kota Batu. Data sekunder ini kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperkuat argumen yang didapat dari sumber primer. Data sekunder ini terdiri dari dokumen, arsip, buku, literatur, koran, majalah, dan informasi internet yang berkaitan dengan fenomena sosial terkait kasus kekerasan di Kota Batu.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mendapatkan data lapangan dengan akurat sesuai fakta, memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian "Analisis PUSPAGA Bhakti Pertiwi sebagai Komunikasi

Pemerintah dalam Upaya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Batu", menggunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk menghimpun informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan, dengan tujuan tertentu. Proses ini digunakan untuk teknik pengumpulan data dalam studi pendahuluan serta pencarian informasi mendalam dari para informan.

Pengumpulan data wawancara dengan Kepala Bidang Ibu Amida Yusiana, S.Sos, Koordinator PUSPAGA Bhakti Pertiwi Ibu Dra. Yumei Astutik, M.Si, Psikolog, Konselor PUSPAGA Bhakti Pertiwi Mbak Lovita Siregar, S.Psi, serta atas nama LR dan RK selaku klien atau penerima layanan dari PUSPAGA Bhakti Pertiwi yang telah dilakukan menggunakan panduan wawancara atau *interview guide* serta alat perekam suara yang dijadikan sebagai panduan serta bukti kongkrit dalam proses penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah metode umum dalam penelitian kualitatif yang memanfaatkan pengelihatian, pendengaran, bahkan penciuman untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan melihat fakta dan kejadian yang terjadi. Observasi dibutuhkan untuk melihat secara langsung melalui partisipasi aktif peneliti terkait mekanisme komunikasi pemerintah dalam menyelenggarakan PUSPAGA Bhakti Pertiwi, yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan di Kota Batu.

Pada tahap awal observasi peneliti telah melakukan penelitian partisipatif aktif melalui magang riset selama 4 bulan pada DP3AP2KB Kota Batu untuk mengamati fakta, berdiskusi, dan memvalidasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya, peneliti akan berkoordinasi dengan Kepala DP3AP2K Kota Batu. Langkah

berikutnya, peneliti akan melanjutkan observasi dengan membandingkan fakta yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dengan situasi lapangan, serta memverifikasi data awal yang telah dikumpulkan dari tahap pra-observasi sebelumnya.

c. Studi Literatur

Studi literature digunakan peneliti sebagai pengumpulan serta pengambilan inti serta gambaran dari penelitian sebelumnya. Selain itu teknik pengumpulan data menggunakan studi literature ini bertujuan untuk mengumpulkan kosep, teori dasar, artikel, serta dokumen lainnya sebagai mengkaji permasalahan secara terstruktur. Teknik pengumpulan data ini ialah studi literatue ini digunakan peneliti dalam menganalisis literature yang telah ada sebelumnya mengenai komunikasi pemerintah, PUSPAGA Bhakti Pertiwi, serta kasus kekerasan yang telah dilakukan sebelumnya pada beberapa kota/kabupaten yang ada di Indonesia serta beberapa negara yang memiliki permasalahan kasus kekerasan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dipandang sebagai pencatatan kejadian yang sudah terjadi, gambaran berupa arsip ataupun pendapat dari para ahli yang peneliti gunakan sebagai pemecahan permasalahan dalam penelitian serta dapat memebantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian secara konkrit. Adapun beberpa data yang telah diambil peneliti melalui teknik pengumpulan data berupa gambaran umum, struktur organisasi, SAKIP, LKJiP, RENJA, RENSTRA, dan Pedoman PUSPAGA.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah Kota Batu dengan unit analisis atau lokus spesifik pada DP3AP2KB Kota Batu, Kepala Bidang PPPA Kota Batu, PUSPAGA Bhakti Pertiwi Kota Batu. Lembaga ini berperan sebagai penyedia layanan untuk masyarakat yang menjadi korban

kekerasan di Kota Batu. Perannya sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan, mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban. Dinas P3AP2KB Kota Batu sebagai tempat dilakukannya penelitian karena lembaga ini sangat aktif dalam usaha menurunkan angka kekerasan di Kota Batu.

1.7.5 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah narasumber yang memaparkan data serta informasi terkait. Subjek dalam penelitian ini diantaranya adalah Kepala Bidang PPPA Ibu Amida Yusiana, S.Sos, Koordinator PUSPAGA Bhakti Pertiwi Ibu Dra. Yumei Astutik, M.Si, Psikolog, Konselor PUSPAGA Bhakti Pertiwi Mbak Lovita Siregar, S.Psi, serta atas nama LR dan RK selaku klien atau penerima layanan dari PUSPAGA Bhakti Pertiwi yang berhubungan dengan mekanisme terjalannya komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan di Kota Batu.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan sebagai pengumpulan data yang terkait dengan komunikasi pemerintah dalam penyelenggaraan PUSPAGA Bhakti Pertiwi dalam upaya penanganan kekerasan di Kota Batu. Dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada informan terkait untuk memvalidasi dan mengklarifikasi data yang ada.

a. Reduksi Data

Proses merangkum, memilah, dan memusatkan hal-hal penting yang ditemukan dari wawancara dengan subjek/informan. Data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian disaring atau dipilah oleh peneliti berdasarkan fokus penelitian dan aspek-aspek yang mendukung hasil dan pembahasan mengenai Analisis PUSPAGA Bhakti Pertiwi sebagai Komunikasi Pemerintah dalam upaya penanganan Kekerasan di Kota Batu.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data bentuk narasi teks, didukung oleh tabel, diagram, dan materi visual lainnya, untuk mendukung analisis penelitian. Peneliti merinci hasil wawancara dengan informan yang telah disesuaikan dengan indikator dan fenomena sosial yang terkait dengan kasus kekerasan di Kota Batu yang ditemukan selama penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mempertimbangkan data yang satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan analisis penelitian. Kesimpulan awal mungkin bersifat sementara sebelum adanya bukti-bukti yang valid. Oleh karena itu, peneliti perlu mengumpulkan data yang kuat untuk membuat kesimpulan akhir yang lebih kuat.

